



Katalog BPS : 4601003.72

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN SULAWESI TENGAH 2012

<http://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**STATISTIK POLITIK
DAN KEAMANAN
SULAWESI TENGAH**

2012

<http://sulteng.bps.go.id>

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN SULAWESI TENGAH 2012

ISBN : 979 480 988 8

KATALOG BPS : 4601003.72

No. Publikasi : 72.000.1219

Ukuran Buku : 18 cm x 24 cm

Jumlah Halaman : 40 + vii rumawi

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Penyunting :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak Oleh :
Percetakan Rio Palu

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012” merupakan publikasi pertama yang menyajikan data atau informasi perkembangan situasi politik dan keamanan. Data dalam publikasi ini terbagi menjadi dua. Pertama statistik politik yang menggambarkan hasil pemilu/pilkada. Kedua statistik keamanan yang menggambarkan kejadian tindak pidana.

Data yang disajikan dihimpun dari kegiatan kompilasi data registrasi dari instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antarwaktu dan antarwilayah dengan cakupan seluruh kabupaten/kota.

Besar harapan kami publikasi ini tetap memberikan manfaat bagi semua masyarakat pengguna data, seperti para penyelenggara pemerintahan, peneliti, dan dunia usaha dalam rangka mencermati dinamika politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Palu, Oktober 2012

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah,



Drs. Ibram Syahboedin, MA
NIP 195811211980031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENJELASAN UMUM	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	2
BAB II METODOLOGI	3
2.1. Ruang Lingkup.....	3
2.2. Sumber Data.....	3
2.3. Metode Pengumpulan Data.....	3
BAB III KONSEP DAN DEFINISI	4
3.1. Statistik Politik.....	4
3.2. Statistik Keamanan.....	7
BAB IV STATISTIK POLITIK	10
4.1. Pemilihan Kepala Daerah.....	10
4.2. Pemilu Legislatif 2009.....	16
4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21
BAB V STATISTIK KEAMANAN	27

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir	11
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada.....	12
Tabel 4.3 Jumlah Kandidat, Perolehan Suara Sah Calon Terpilih, dan Partai Pengusungnya dalam Pilkada	13
Tabel 4.4 Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Jabatan Sebelumnya.....	14
Tabel 4.5 Persentase Perolehan Suara Calon Kepala Daerah Hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011	15
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009	17
Tabel 4.7 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009.....	18
Tabel 4.8 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009	19
Tabel 4.9 Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin Tahun 2011.....	22
Tabel 4.10 Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur Tahun 2011 ...	23
Tabel 4.11 Jumlah Anggota DPRD menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011	24

Tabel 4.12	Jumlah <i>Hearing</i> DPRD Tahun 2010 - 2011	25
Tabel 4.13	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Tahun 2011.....	26
Tabel 5.1	Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011	28
Tabel 5.2	Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2011	29
Tabel 5.3	Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Tahun 2009 - 2011	30
Tabel 5.4	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>) Tahun 2009 - 2011	31
Tabel 5.5	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 penduduk Tahun 2009-2011	32
Tabel 5.6	Jumlah Bentuk Tindak Pidana menurut Penggolongan Kejahatan Tahun 2009 - 2011	33
Tabel 5.7	Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2010 - 2011	34
Tabel 5.8	Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2010 - 2011	36
Tabel 5.9	Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011	38
Tabel 5.10	Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	39
Tabel 5.11	Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin Tahun 2011	40

BAB I

PENJELASAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membbaiknya kehidupan berdemokrasi di antaranya tercermin dalam dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap.

Dinamika politik seringkali berimbas pada aspek lain, terutama bidang keamanan. Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan. Ini berarti diperlukan alat untuk memantau perkembangan situasi politik dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antarwaktu dan antarwilayah.

Badan Pusat Statistik berupaya memenuhi kebutuhan akan alat untuk memantau perkembangan situasi politik dan keamanan dengan melakukan kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan. Kegiatan tersebut telah mulai dirintis sejak tahun 2008 dengan cakupan hanya terbatas sampai tingkat provinsi. Pada tahun 2010 cakupan diperluas hingga tingkat kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini diharapkan terkumpul data tentang situasi politik dan keamanan dan dapat memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik

dan keamanan antarwaktu dan antarwilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan bertujuan untuk:

- i. menghimpun data statistik politik dan keamanan
- ii. memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan keamanan,
- iii. memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antarwaktu dan antar wilayah.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik politik dan keamanan tahun 2011 mencakup data tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Referensi waktu bagi data merujuk kepada kejadian dari Januari - Desember 2011. Namun demikian, ada pula data yang mengacu kepada kejadian satu atau dua tahun sebelumnya.

2.2. Sumber Data

Data statistik politik dan keamanan bersumber dari hasil kompilasi data di berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Instansi terkait di tingkat provinsi terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemerintah Daerah provinsi, Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi, dan Sekretariat DPRD Provinsi. Instansi terkait yang menjadi sumber data di tingkat kabupaten/kota terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Kepolisian Resort (Polres), Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, dan Sekretariat DPRD kabupaten/kota.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Data untuk menyusun statistik politik dan keamanan 2012 ini dikumpulkan melalui kompilasi data hasil registrasi/catatan instansi terkait. Pengumpulan data menggunakan dua jenis instrumen berupa rancangan (*dummy*) tabel dan kuesioner. Dari kedua jenis instrumen tersebut, BPS daerah bebas memilih instrumen mana yang dianggap paling sesuai untuk pengumpulan data.

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

3.1. Statistik Politik

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan konsep dan definisi. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definisi yang ada. Berikut ini adalah konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini.

- a) **Pemerintahan daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b) **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) **Daerah otonom**, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d) **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e) **Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f) **Penduduk** adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
- g) **Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- h) **Pemilih** adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- i) **Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD.

j) Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:

(1) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik;
- b. memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlah provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. memiliki anggota sekurang-kurangnya seribu orang atau 1/1.000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

(2) Partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya.

- k) **Golongan putih** (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;
- l) **Partisipasi penduduk dalam pemilu** adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

3.2. Statistik Keamanan

Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi/istilah yang dicakup dalam statistik keamanan :

A. Pengertian Tindak Pidana

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang)
- Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan hukum.

Adanya tindak pidana harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan manusia
- Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

- Melawan hukum (syarat materiil)

B. Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran

a. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.

b. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah :

- peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
- peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
- peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- peristiwa yang telah kadaluwarsa.

C. Pelaku Tindak Kriminalitas

a. Pelaku tindak kriminalitas adalah:

- orang yang melakukan tindak kriminalitas.
- orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
- orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.

- orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
 - orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.
- b. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :
- anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari enam belas tahun.
 - dewasa adalah orang yang berumur enam belas tahun dan lebih.
 - umum adalah anak-anak dan dewasa.
- c. **Tahanan** adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.
- d. **Kerugian** adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

BAB IV

STATISTIK POLITIK

4.1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan suatu tahap baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut kedaulatan politik benar-benar di tangan rakyat. Melalui pilkada yang dilakukan secara langsung, rakyat menentukan sendiri kepala daerah, bahkan yang bukan berasal dari partai politik (calon independen). Pilkada serentak mulai dikenal sejak diterbitkan UU no. 32/2004 tentang pemerintah daerah. Berkaitan dengan pencalonan diatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memperoleh kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara atau kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai diluar parlemen lokal tersebut.

Pada UU no. 12/2008 tentang perubahan kedua UU no. 32/2004 tentang pemerintahan daerah diakomodir peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam pilkada. Syarat untuk dapat mencalonkan harus mengumpulkan surat dukungan yang besarnya bervariasi antara 3 - 6,5 persen dari jumlah penduduk, bergantung dari jumlah penduduk di daerah tersebut. Tabel 4.1 menampilkan waktu pelaksanaan dan banyaknya calon pada pilkada. Jumlah DPT dan suara sah ditampilkan pada Tabel 4.2, sementara perolehan suara ditampilkan pada Tabel 4.3. Pada Tabel 4.4 ditampilkan jenis kelamin serta latar belakang kepala daerah terpilih. Hasil pemilihan gubernur

Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011 ditampilkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir

Kabupaten/Kota	Pilkada	
	Gubernur	Bupati/Walikota
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	http://sulawesi.tengah.go.id	6 Juli 2011
2. Banggai		6 April 2011
3. Morowali		5 November 2007
4. Poso		2 Juni 2010
5. Donggala		31 Juli 2010
6. Tolitoli		31 Agustus 2010
7. Buol		10 Oktober 2007
8. Parigi Moutong		19 Agustus 2008
9. Tojo Una-una		2 Juni 2010
10. Sigi		16 September 2010
11. Palu		4 Agustus 2010
Sulawesi Tengah	6 April 2011	

Sumber : KPU

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada

Kabupaten/ Kota	Pemilihan Gubernur		Pemilihan Bupati/Walikota	
	Terdaftar	Mengguna kan Hak Pilih	Terdaftar	Mengguna kan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	108.877	90.515	111.344	96.705
2. Banggai	241.560	177.647	241.560	178.578
3. Morowali	133.549	99.378	119.414	103.542
4. Poso	142.856	104.272	142.770	117.528
5. Donggala	178.739	133.059	305.513	239.294
6. Tolitoli	145.878	90.515	146.220	94.014
7. Buol	84.146	65.995	73.936	67.395
8. Parigi Moutong	276.745	204.551	256.999	214.621
9. Tojo Una-una	93.998	67.914	92.008	75.618
10. Sigi	149.296	112.042	147.713	113.500
11. Palu	230.119	141.695	227.908	138.758
Sulawesi Tengah	1.785.763	1.292.369	1.559.872	1.200.259

Sumber : KPU

Tabel 4.3. Jumlah Kandidat, Perolehan Suara Sah Calon Terpilih, dan Partai Pengusungnya dalam Pilkada

Kabupaten/Kota	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah Calon Terpilih		Partai Pengusung Calon Terpilih
		Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	3	39.242	40,57	Hanura, PKPB, PPRN, PKS, PNIM, PDP, PKP, PMB, Partai Republikan, PDS, Partai Patriot
2. Banggai	6	65.560	37,61	Partai Golkar, PDIP, PDS, Gerindra
3. Morowali	5	26.271	25,76	PBB, PDS, Partai Buruh
4. Poso	4	45.119	38,76	Partai Demokrat
5. Donggala	7	83.463	35,50	Partai Golkar
6. Tolitoli	3	36.944	41,93	Partai Patriot, PPPI, Gerindra, PNBKI, Barnas, PBB, PKBI, Pakar Pangan, Partai Kedaulatan, PAN
7. Buol	5	18.546	28,10	Partai Golkar
8. Parigi Moutong	3	99.978	47,7	Demokrat, PBB, PDIP, PPP, PKB
9. Tojo Una-una	7	24.370	32,00	Golkar, PPP, PIS, Partai Republikan
10. Sigi	6	34.452	31,58	PBR, PDS, PDIP
11. Palu	6	43.411	31,28	Partai Republikan Golkar, PAN
Sulawesi Tengah	5	694.299	54,43	Hanura, PPP, Gerindra, PKPB, PDP, Patriot

Sumber : KPU

Tabel 4.4. Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Jabatan Sebelumnya

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(5)
1. Banggai Kepulauan	Laki-laki	S-2	Wiraswasta
2. Banggai	Laki-laki	S-2	Pensiunan Anggota DPR
3. Morowali	Laki-laki	S-1	PNS
4. P o s o	Laki-laki	S-2	Bupati Poso
5. Donggala	Laki-laki	S-2	Bupati Donggala
6. Tolitoli	Laki-laki	S-2	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-toli
7. B u o l	Laki-laki	S-2	Ketua DPRD Kab. Buol
8. Parigi Moutong	Laki-laki	S-2	Bupati Parimo
9. Tojo Una-una	Laki-laki	S-1	Bupati Tojo Una-una
10. S i g i	Laki-laki	S-2	Kepala Dinas PU, Pertambangan, dan Energi Prov. Sulawesi Tengah
11. P a l u	Laki-laki	SMA	Walikota Palu
Sulawesi Tengah	Laki-laki	S-2	Bupati Parigi Moutong

Sumber : KPU

Tabel 4.5. Persentase Perolehan Suara Calon Kepala Daerah Hasil Pemilihan Gubernur Tengah Sulawesi Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Nomor Urut Calon ^{*)}				
	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	8,25	3,93	66,77	15,77	5,27
2. Banggai	5,89	3,73	69,48	12,26	8,64
3. Morowali	13,15	12,89	50,13	7,24	16,59
4. Poso	13,12	13,76	40,50	25,16	7,46
5. Donggala	36,72	6,22	35,85	15,92	5,29
6. Tolitoli	12,32	7,20	41,96	9,44	29,09
7. Buol	51,23	2,16	36,79	2,75	7,07
8. Parigi Moutong	7,05	17,82	67,62	4,13	3,38
9. Tojo Una-una	21,35	9,80	38,14	23,30	7,41
10. Sigi	26,01	5,20	54,05	8,21	6,53
11. Palu	8,46	10,03	64,40	9,59	7,52
Sulawesi Tengah	16,18	9,06	54,43	11,62	8,71

Sumber : KPUD

Keterangan *):

1. Prof (Em) Drs. H Aminuddin Ponulele, MS. – DR. Hj. Luciana IS Baculu, SE. MM
2. H. Sahabudin Mustafa – H. Faisal Mahmud
3. Drs. H. Longki Djanggola, M.Si – H. Sudarto, SH. M.Hum
4. Ir. H. Rendy M. Affandi Lamadjido – H. Bandjela Paliudju
5. H. Achmad Yahya, SE. MM. - Drs. H. Moh. Ma'ruf Bantilan, MM

4.2. Pemilu Legislatif 2009

Untuk pertama kalinya, pada pemilu legislatif 2009 Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu yang diselenggarakan tanggal 9 April 2009 menghasilkan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Pemilu Legislatif, dari jumlah penduduk yang terdaftar sebesar 1.663.623 orang di Sulawesi Tengah, hanya sekitar 77,95 persen yang melaksanakan hak pilihnya atau 1.296.819 orang. Dari pemilih yang memberikan suara tersebut sebanyak 96.989 (7,48 persen) suara tidak sah. Partai Golongan Karya menjadi pemenang dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah perolehan suara sebanyak 242.130 suara (19,88 persen). Diikuti Partai Demokrat dengan jumlah perolehan suara 142.402 suara (11,69 persen) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di urutan ketiga dengan perolehan suara 76.351 (6,27 persen).

Dari 38 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah semua mendapat suara. Namun hanya lima belas partai yang memperoleh kursi di DPRD. Partai Golongan Karya memperoleh kursi terbanyak sebanyak sembilan kursi, diikuti Partai Demokrat yang memperoleh enam kursi.

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2009	
	Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	105.764	94.970
2. Banggai	208.560	162.550
3. Morowali	134.268	101.766
4. P o s o	131.120	108.883
5. Donggala	317.823	243.264
6. Tolitoli	141.750	109.377
7. B u o l	79.130	67.757
8. Parigi Moutong	265.102	206.948
9. Tojo Una-una	85.737	70.654
10. S i g i	-	-
11. P a l u	194.369	130.650
Sulawesi Tengah	1.663.623	1.296.819

Sumber : KPUD

Keterangan : Kab. Sigi masih bergabung dengan Kab. Donggala

Tabel 4.7 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2009		
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	87.189	7.781	10.353
2. Banggai	152.143	10.407	46.899
3. Morowali	98.077	3.689	31.965
4. Poso	103.880	5.003	21.581
5. Donggala	224.054	19.210	73.058
6. Tolitoli	98.122	11.255	31.963
7. Buol	60.779	6.978	11.373
8. Parigi Moutong	188.044	18.904	56.058
9. Tojo Una-una	65.214	5.440	14.203
10. Sigi	-	-	-
11. Palu	122.328	8.322	64.421
Sulawesi Tengah	1.199.830	96.989	361.874

Sumber : KPUD

Keterangan : Kab. Sigi masih bergabung dengan Kab. Donggala

Tabel 4.8. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009

Partai Politik	Jumlah Perolehan	
	Suara	Kursi
(1)	(2)	(3)
1. Partai Hati Nurani Rakyat	59.425	3
2. Partai Karya Peduli Bangsa	45.009	2
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	11.627	-
4. Partai Peduli Rakyat Indonesia	28.627	-
5. Partai Gerakan Indonesia Raya	45.077	2
6. Partai Barisan Nasional	16.861	-
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	34.888	2
8. Partai Keadilan Sejahtera	58.947	4
9. Partai Amanat Nasional	66.810	4
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru	7.648	-
11. Partai Kedaulatan	10.141	-
12. Partai Persatuan Daerah	7.609	-
13. Partai Kebangkitan Bangsa	39.797	1
14. Partai Pemuda Indonesia	8.916	-
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	8.556	-
16. Partai Demokrasi Pembaruan	23.854	1
17. Partai Karya Perjuangan	9.042	-
18. Partai Matahari Bangsa	8.014	-
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.474	-
20. Partai Demokrasi Kebangsaan	10.397	-

Sumber : KPUD

Lanjutan Tabel 4.8

Partai Politik	Jumlah Perolehan	
	Suara	Kursi
(1)	(2)	(3)
21. Partai Republika Nusantara	13.694	-
22. Partai Pelopor	9.385	-
23. Partai Golongan Karya	242.130	9
24. Partai Persatuan Pembangunan	43.634	2
25. Partai Damai Sejahtera	60.288	3
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	4.234	-
27. Partai Bulan Bintang	26.994	-
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	76.351	4
29. Partai Bintang Reformasi	27.741	1
30. Partai Patriot	36.896	1
31. Partai Demokrat	142.403	6
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia	11.027	-
33. Partai Indonesia Sejahtera	5.233	-
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama	9.118	-
41. Partai Merdeka	1.034	-
42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	166	-
43. Partai Serikat Indonesia	255	-
44. Partai Buruh	4.465	-

Sumber : KPUD

4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada masa Orde Baru keanggotaan DPRD terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPRD hasil pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPRD yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. DPRD hasil pemilu 2004 berbeda dengan yang sebelumnya, seluruh anggota DPRD merupakan hasil pemilu.

Terdapat perbedaan mendasar pada pemilu 2009 terkait dengan model keterpilihan sebagai anggota DPRD. Calon anggota DPRD terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut pada Daftar Calon Tetap (DPT), melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Caleg. Mekanisme ini membuat semua kandidat dalam DPT memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi di Sulawesi Tengah menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan ditampilkan pada Tabel 4.9, Tabel 4.10, dan Tabel 4.11. Tabel 4.12 memuat jumlah *hearing* yang dilakukan oleh anggota DPRD selama tahun 2011. Sedangkan Tabel 4.13 menampilkan jumlah produk DPRD yang menggambarkan kinerja dari anggota DPRD.

Tabel 4.9. Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	20	4	24
2. Banggai	28	6	34
3. Morowali	22	3	25
4. Poso	30	0	30
5. Donggala	25	5	30
6. Tolitoli	24	6	30
7. Buol	19	6	25
8. Parigi Moutong	34	6	40
9. Tojo Una-una	25	0	25
10. Sigi	24	5	29
11. Palu	24	6	30
Sulawesi Tengah	37	8	45

Sumber : Sekretariat DPRD

Tabel 4.10. Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur Tahun 2011

Kabupaten/Kota	21 – 35	36 – 49	50 – 59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	5	12	4	3
2. Banggai	2	27	4	1
3. Morowali	3	14	8	0
4. Poso	1	21	5	3
5. Donggala	4	16	10	0
6. Tolitoli	2	22	2	4
7. Buol	4	16	4	1
8. Parigi Moutong	7	21	8	4
9. Tojo Una-una	3	19	1	2
10. Sigi	4	17	4	4
11. Palu	1	23	3	3
Sulawesi Tengah	3	16	14	12

Sumber : Sekretariat DPRD

Tabel 4.11. Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Pendidikan Terakhir				
	< SLTA	SLTA	D1 - D3	S1	S2 - S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Banggai Kepulauan	-	6	2	11	5
2. Banggai	-	12	-	15	7
3. Morowali	-	7	-	18	-
4. Poso	-	9	-	20	1
5. Donggala	-	6	-	22	2
6. Tolitoli	-	16	-	11	3
7. Buol	-	11	1	8	5
8. Parigi Moutong	-	11	3	21	5
9. Tojo Una-una	-	10	1	14	-
10. Sigi	-	9	2	16	2
11. Palu	-	9	-	18	3
Sulawesi Tengah	-	8	-	27	10

Sumber : Sekretariat DPRD

Tabel 4.12. Jumlah *Hearing* DPRD Tahun 2010 - 2011

Kabupaten/Kota	Tahun	
	2010	2011
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	2	2
2. Banggai	105	63
3. Morowali	59	57
4. Poso	27	57
5. Donggala	15	13
6. Tolitoli	15	7
7. Buol	33	22
8. Parigi Moutong	40	39
9. Tojo Una-una	9	1
10. Sigi	37	36
11. Palu	14	8
Sulawesi Tengah	341	292

Sumber : Sekretariat DPRD

Tabel 4.13. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah	Keputusan DPRD	Keputusan pimpinan DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	13	10	6
2. Banggai	21	15	1
3. Morowali	10	7	14
4. Poso	16	0	0
5. Donggala	13	12	8
6. Tolitoli	21	6	5
7. Buol	18	9	18
8. Parigi Moutong	9	17	13
9. Tojo Una-una	0	55	3
10. Sigi	14	19	13
11. Palu	1	18	16
Sulawesi Tengah	7	22	24

Sumber : Sekretariat DPRD

BAB V

STATISTIK KEAMANAN

Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi menjadi sepuluh kabupaten dan satu kota hampir semuanya telah memiliki kantor Kepolisian Resort (polres) kecuali Kabupaten Sigi. Untuk pelayanan tingkat polres, warga Kabupaten Sigi masih dilayani oleh kantor Polres Donggala. Jumlah pos polisi terbanyak di Kabupaten Poso yaitu 157 pos polisi sedangkan kabupaten lain kisarannya 3-14 pos polisi.

Rasio penduduk per polisi yang ditampilkan pada Tabel 5.2 menggambar dengan jumlah polisi sebanyak 2.556 orang yang bertugas di Sulawesi Tengah, setiap satu orang polisi harus menangani 1.032 orang penduduk. Untuk tingkat polres, Kabupaten Parigi Moutong memiliki rasio penduduk per polisi paling tinggi di Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso memiliki rasio penduduk per polisi terendah.

Tabel 5.4 menunjukkan selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*), selang waktu yang semakin pendek menunjukkan intensitas kejadian tindak pidana semakin tinggi. Kota Palu memiliki intensitas tindak pidana yang paling tinggi di Sulawesi Tengah. Untuk wilayah yang intensitas tindak pidananya paling rendah di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Toli-toli.

Tabel 5.1. Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	1	7	14
2. Banggai	1	10	11
3. Morowali	1	12	3
4. Poso	1	12	157
5. Donggala	1	13	10
6. Tolitoli	1	10	12
7. Buol	1	5	6
8. Parigi Moutong	1	10	13
9. Tojo Una-una	1	7	4
10. Sigi	0	5	12
11. Palu	1	4	5
Sulawesi Tengah	10	95	247

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Tabel 5.2. Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi		Rasio Penduduk per Polisi
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(5)
1. Banggai Kepulauan	399	0	430
2. Banggai	537	7	598
3. Morowali	456	0	452
4. Poso	928	5	224
5. Donggala	787	8	349
6. Tolitoli	438	4	478
7. Buol	376	1	351
8. Parigi Moutong	522	12	775
9. Tojo Una-una	332	1	414
10. Sigi	-	-	-
11. Palu	844	18	390
Sulawesi Tengah	2.463	93	1.032

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Tabel 5.3. Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Tahun 2009 - 2011

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	131	140	113
2. Banggai	810	841	900
3. Morowali	354	242	244
4. Poso	227	223	255
5. Donggala	367	434	773
6. Tolitoli	164	86	306
7. Buol	154	174	214
8. Parigi Moutong	561	393	379
9. Tojo Una-una	289	400	254
10. Sigi	-	-	0
11. Palu	1.009	966	1.224
12. Dit Reskrim (Sulawesi Tengah)	138	143	136
Jumlah	4.204	4.042	4.798

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Tabel 5.4. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock) Tahun 2009 - 2011

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	39 ⁰ 16'48"	01 ⁰ 07'12 "	24 ⁰ 24'00"
2. Banggai	06 ⁰ 06'00"	06 ⁰ 00'14"	05 ⁰ 50'24"
3. Morowali	12 ⁰ 22'12"	18 ⁰ 07'48"	15 ⁰ 40'12"
4. P o s o	21 ⁰ 28'12"	22 ⁰ 31'48"	18 ⁰ 55'12"
5. Donggala	08 ⁰ 13' 12"	07 ⁰ 42'36"	06 ⁰ 40'12"
6. Tolitoli	15 ⁰ 23'33"	16 ⁰ 27'35"	01 ⁰ 57'26"
7. B u o l	27 ⁰ 16'48"	26 ⁰ 37'12"	18 ⁰ 49'48"
8. Parigi Moutong	08 ⁰ 25'12"	08 ⁰ 25'12"	09 ⁰ 41'24"
9. Tojo Una-una	20 ⁰ 33'36"	24 ⁰ 03'36"	23 ⁰ 48'00"
10. S i g i	-	-	-
11. P a l u	03 ⁰ 55'12"	4 ⁰ 18'00"	03 ⁰ 33'36"
Sulawesi Tengah	24⁰44'02 "	24⁰56'24"	23⁰32'24"

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Keterangan: ⁰ = jam

' = menit

" = detik

Tabel 5.5. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Tahun 2009 - 2011

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	142,12	168,91	478,10
2. Banggai	483,00	450,49	217,10
3. Morowali	60,12	234,25	369,10
4. Poso	239,98	188,29	451,90
5. Donggala	390,98	409,76	211,40
6. Tolitoli	176,52	115,01	478,00
7. Buol	269,99	247,77	284,60
8. Parigi Moutong	275,57	211,29	457,50
9. Tojo Una-una	223,79	264,00	374,50
10. Sigi	-	-	-
11. Palu	590,08	606,63	136,90
Sulawesi Tengah	305,61	296,53	298,60

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Tabel 5.6. Jumlah Bentuk Tindak Pidana menurut Penggolongan Kejahatan Tahun 2009 - 2011

No.	Kasus	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kejahatan Konvensional	8.383	7.673	9.054
2.	Kejahatan Trans Nasional	34	18	7
3.	Kejahatan Merugikan Negara	141	114	46
4.	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi	0	0	1
5.	Pelanggaran Ham	-	4	7
Sulawesi Tengah		8.558	7.809	9.115

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Tabel 5.7. Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2010 - 2011

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana					
	Pembunuhan		Perkosaan		Penganiayaan Ringan	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Banggai Kepulauan	0	0	6	3	3	0
2. Banggai	0	1	8	1	9	2
3. Morowali	0	1	7	2	7	16
4. Poso	0	0	3	2	28	5
5. Donggala	0	1	14	23	54	84
6. Tolitoli	0	0	3	3	7	0
7. Buol	0	0	0	4	0	0
8. Parigi Moutong	0	2	5	4	131	70
9. Tojo Una-una	0	1	3	3	7	6
10. Sigi	0	0	0	0	0	0
11. Palu	0	3	4	1	27	17
Sulawesi Tengah	0	9	53	43	273	200

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Lanjutan Tabel 5.7

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana			
	Penganiayaan Berat		Penculikan	
	2010	2011	2011	2010
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Banggai Kepulauan	0	0	0	0
2. Banggai	0	0	0	0
3. Morowali	1	2	0	0
4. Poso	10	0	0	0
5. Donggala	60	28	0	0
6. Tolitoli	4	0	0	0
7. Buol	0	4	0	0
8. Parigi Moutong	21	4	0	0
9. Tojo Una-una	3	0	0	0
10. Sigi	0	0	0	0
11. Palu	0	7	0	0
Sulawesi Tengah	99	45	0	0

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Tabel 5.8. Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2011

Kabupaten/Kota (1)	Jenis Tindak Pidana				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)
1. Banggai Kepulauan	0	10	0	12	0
2. Banggai	3	76	74	144	3
3. Morowali	3	36	34	4	1
4. Poso	5	13	3	68	0
5. Donggala	2	32	48	25	2
6. Tolitoli	0	17	50	48	3
7. Buol	0	43	3	74	0
8. Parigi Moutong	0	43	45	189	2
9. Tojo Una-una	0	18	6	27	1
10. Sigi	-	-	-	-	-
11. Palu	0	88	396	0	40
Sulawesi Tengah	13	366	659	579	52

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Keterangan :

- 1 Pembakaran dengan sengaja
- 2 Pengrusakan/ Penghancuran barang
- 3 Pencurian dengan pemberatan
- 4 Pencurian ringan
- 5 Pencurian dengan kekerasan

Lanjutan Tabel 5.8

Kabupaten/Kota (1)	Jenis Tindak Pidana				
	6 (7)	7 (8)	8 (9)	9 (10)	10 (11)
1. Banggai Kepulauan	0	35	0	0	0
2. Banggai	3	143	0	41	0
3. Morowali	0	55	0	4	0
4. Poso	0	33	0	4	2
5. Donggala	3	31	0	2	45
6. Tolitoli	0	22	0	20	0
7. Buol	0	41	0	3	0
8. Parigi Moutong	2	66	0	13	147
9. Tojo Una-una	1	36	0	4	4
10. Sigi	-	-	-	-	-
11. Palu	10	216	0	324	316
Sulawesi Tengah	19	643	0	415	514

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Keterangan :

- 6 Pencurian dalam keluarga
- 7 Penipuan/ Perbuatan curang
- 8 Penadahan
- 9 Pencurian kendaraan bermotor
- 10 Pencurian Lainnya

Tabel 5.9. Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011

No.	Jenis Tindak Pidana	2011
(1)	(2)	(3)
1.	Pencurian Biasa	1.073
2.	Pencurian Berat	660
3.	Penggelapan	504
4.	Pengeroyokan	394
5.	Pencurian Kendaraan Bermotor	391
6.	Penganiayaan Ringan	287
7.	Pengrusakan	399
8.	Pemerasan / Pengancaman	313
9.	Perjudian	328
10.	Penghinaan	326

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Tabel 5.10. Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-Anak	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	38	12	2	0
2. Banggai	25	8	5	0
3. Morowali	20	7	2	0
4. Poso	31	18	12	0
5. Donggala	46	21	3	0
6. Tolitoli	12	9	2	0
7. Buol	8	1	1	0
8. Parigi Moutong	36	12	18	0
9. Tojo Una-una	6	3	1	0
10. Sigi	-	-	-	-
11. Palu	51	31	12	0
Sulawesi Tengah	273	122	58	0

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

Tabel 5.11. Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Kabupaten/Kota	WNI		WNA	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	40	12	0	0
2. Banggai	30	8	0	0
3. Morowali	22	7	0	0
4. Poso	43	18	0	0
5. Donggala	49	21	0	0
6. Tolitoli	14	9	0	0
7. Buol	9	1	0	0
8. Parigi Moutong	54	12	0	0
9. Tojo Una-una	7	3	0	0
10. Sigi	-	-	0	0
11. Palu	63	31	0	0
Sulawesi Tengah	331	122	0	0

Sumber : Polda Sulawesi Tengah

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No.48 Palu 94114 Telp : (0451) 483611, 483613 Fax. 483612
Homepage : <http://sulteng.bps.go.id> E-mail : bps7200@bps.go.id